

KENDALA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN LINTAU BUO

Silvia Sukma Sari^{1(a)}

¹Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}silviasukmasari@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

23-08-2022

Diterbitkan Online:

10-12-2022

Kata Kunci:

Implementasi, Peraturan
Presiden, Vaksinasi Covid

Keywords:

Implementation, Presidential
Decree, Covid Vaccination

Corresponding Author:

silviasukmasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendala pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang terjadi di Kecamatan Lintau Buo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif semu dengan menggunakan metode simple research, penarikan informan menggunakan teknik purposive sampling. Dengan demikian pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data ini diuji dengan triangulasi sumber lalu kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik bahwa kendala yang terjadi pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo terbagi atas 2 ialah hambatan internal serta hambatan eksternal. Hambatan internal pada pelaksanaan tahap 1 sampai 4 adalah ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Sumber daya manusia pada agen pelaksana yang belum optimal. Dalam registrasi pelaksanaan vaksinasi, Nomor Induk Kependudukan masyarakat tidak ditemukan sehingga mereka harus melapor kepada Dukcapil terlebih dahulu. Selain itu kapasitas cold chain kurang mencukupi untuk penyimpanan vaksin. Sedangkan kendala eksternal pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 sampai 4 yaitu berasal dari sasaran pelaksanaannya. Minimnya pemahaman warga Lintau Buo hendak penerapan vaksinasi Covid-19. Banyaknya masyarakat hanya menyelesaikan dosis pertama tanpa menuntaskan dosis kedua dengan alasan sudah mendapatkan sertifikat pertama.

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the Covid-19 vaccination that occurred in Lintau Buo District. This type of research is a quasi-qualitative research using simple research methods, the withdrawal of informants using purposive sampling technique. Thus the data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation studies. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. Then the validity of this data was tested by triangulation of sources and then analyzed. Based on the findings, it can be concluded that the obstacles that occur in the implementation of the Covid-19 vaccination in Lintau Buo District are divided into 2 internal and external obstacles. An internal obstacle in the implementation of stages 1 to 4 is the limited availability of vaccines. Human resources in implementing agents are not yet optimal. In the implementation of the implementation, the Population Identification Number of the community was not found so they had to report to the Dukcapil first. In addition, the cold chain capacity is insufficient for vaccine storage. Meanwhile, the external constraints at the launch stage of stages 1 to 4 came from the implementation targets. Lack of public awareness of Lintau Buo regarding the implementation of the Covid-19 vaccination. Many people only complete the first dose without completing the second dose on the grounds that they have already received the first certificate.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i4.57>



PENDAHULUAN

Pada awal maret tahun 2020 Indonesia mengalami musibah dengan masuknya wabah Covid-19. Dinyatakan 2 orang terkonfirmasi Covid-19 (Argista, 2021). Berawal dari 2 orang yang terpapar virus tersebut, jumlah kasus pada penduduk yang terkena Covid-19 semakin meningkat setiap harinya hingga menyebabkan tingginya angka kematian. Diketahui bahwa faktor penyebab resiko penularan meningkat dikarenakan masih banyak masyarakat yang meremehkan dan tidak menerapkan protocol kesehatan sehingga mengakibatkan pro dan kontra terhadap pandemic Covid-19. Dengan adanya dampak langsung dari masalah tersebut, Pemerintah menerapkan proses kegiatan social distancing hingga lockdown yang mengakibatkan seluruh aktivitas terbatas hingga terhenti.

Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kehidupan yang melanda di seluruh dunia. Di Indonesia bermacam usaha sudah dicoba oleh penguasa buat menghentikan laju pertumbuhan Covid-19. Seluruh manusia tanpa terkecuali dari semua kalangan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang baru. Bagi masyarakat kebiasaan baru tersebut diantaranya yaitu kewajiban 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) atau disebut juga dengan peraturan protocol kesehatan (Farina Gandrayani & Fikri, 2021). Pencegahan melalui protocol kesehatan tersebut ternyata tidak mampu dalam menghentikan perjalanan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia.

Perlu dilakukan upaya penanggulangan tidak cuma dari bagian aturan kesehatan. Dibutuhkan pula campur tangan lewat pemberian obat atau vaksin. Dari tahun 2020 hingga 2021 Indonesia masih mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat munculnya penyakit menular Covid-19 ini. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui upaya pemberian vaksin pada semua warga Indonesia untuk buat memutua penyebaran Covid-19. (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020). Mengenai kebijakan pemerintah dalam penerapan vaksinasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Logistik serta Penerapan Vaksinasi Covid-19. Kebijaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan pada tanggal 05 Oktober 2020.

Pelaksanaan vaksinasi pertama di Indonesia dimulai pada 13 Januari 2020, penerima

pertama adalah Presiden Jokowi Widodo. Agar meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa vaksin aman untuk digunakan. Melalui Menteri Kesehatan telah mendistribusikan sejumlah dosis vaksin yang siap untuk digunakan kepada masyarakat Indonesia. Khususnya Indonesia menggunakan sejumlah vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Moderna (Farina Gandrayani & Fikri, 2021). Pelaksanaan vaksin diberikan secara gratis kepada publik dengan upaya mencapai Good Publik. Maka dari itu anggaran pelaksanaan vaksinasi ditanggung oleh pemerintah. Akibat Covid-19 memberikan dampak yang global melanda penduduk Indonesia (Fitriyana, 2021).

Dalam hal itu, Kecamatan Lintau Buo pada Kabupaten Tanah Datar merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pada bulan Februari 2021. Dengan diterapkannya kebijakan ini, sehingga menimbulkan permasalahan yang terjadi. Ditemukan berbagai kendala yang dialami oleh sasaran hingga agen pelaksana vaksinasi di Kecamatan Lintau Buo.

Jika didasarkan pada pengamatan penulis, diketahui bahwa kajian mengenai kendala yang terjadi pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo perlu untuk diketahui dan Untuk itu alasan penulis dalam memilih Kecamatan Lintau Buo sebagai lokasi penelitian adalah ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses penerapan vaksinasi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitas semu (quasi kualitatif) dengan kajian kendala pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo. Menurut Bungin (2020: 183) penggunaan desain quasi kualitatif semu disebabkan pendekatan kualitatif sedang dipengaruhi oleh positivism yang kokoh dalam pelaksanaannya, paling utama dalam meresmikan filosofi yang sedang bertabiat deduktif. Pada dasarnya, desain ini memiliki sisi positivism ketika penelitian dimulai dari sisi deduktif menggunakan teori.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yaitu di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Informan penelitian ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini mengambil informan yaitu Kapolsek, Sekretaris Camat, Ketua Vaksinasi, Sekretaris Nagari dan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder,

yang di peroleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Model analisa data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyaian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu didalamnya terdapat hambatan yang dialami bagus dalam lembaga ataupun diluar lembaga. Dalam penerapan vaksinasi yang dilakukan dengan 4 tahap ditemukan berbagai kendala yang dialami Kecamatan Lintau Buo. Kendala merupakan sesuatu yang dapat menghambat suatu sistem dalam mencapai suatu tujuan yang sebelumnya sudah dirancang. Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:157) membagi tipe hambatan jadi 2 ialah hambatan internal serta hambatan eksternal.

1) Pelaksanaan Vaksinasi Januari-April 2021 Tahap 1

Pelaksanaan vaksinasi pada tahap 1 sasaran utamanya merupakan daya kesehatan serta mahasiswa yang menempuh Pembelajaran yang bertugas sama dengan fasilitas kesehatan.

a) Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang dirasakan dalam organisasi, kendala yang penulis maksud disini ialah kendala yang berasal dari Puskesmas sebagai agen pelaksana maupun pemerintah setempat dari pada pelaksana vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo. berdasarkan hasil temuan penelitian, bentuk kendala yang dialami pada pelaksanaan vaksinasi tahap 1 ini adalah pihak Puskesmas mengalami persediaan vaksin yang masih terbatas, anggaran yang belum memadai, serta sumber daya manusia di Puskesmas yang masih kurang optimal

b) Kendala Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar instansi seperti sasaran kebijakan, kelompok kepentingan, kelompok penekan yang akan menghambatnya proses implementasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui kendala eksternal pelaksanaan vaksinasi adalah minimnya tenaga kesehatan yang

datang tepat waktu dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

2) Pelaksanaan Vaksinasi Januari-April 2021 Tahap 2

Pelaksanaan vaksinasi pada tahap 2 sasaran utamanya yaitu petugas pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, TNI / Polri hingga aparat hukum.

a) Kendala Internal

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui kendala internal pelaksanaan vaksinasi juga sama halnya dengan tahap 1, ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Kesulitan pihak Puskesmas dalam mengajak Aparatur Sipil Negara yang ada di Lintau Buo dalam pelaksanaan vaksinasi. Pada pelaksanaan tahap 2 ini anggaran sudah mulai mencukupi dalam hal pelaksanaan kebijakan.

b) Kendala Eksternal

Untuk kendala eksternal yang di alami dalam pelaksanaan vaksinasi tahap 2 berasal dari sasaran pelaksanaannya. Terdapat Aparatur Sipil Negara yang belum mau di vaksin pada waktu itu, dan tidak melaksanakan dalam tepat waktu.

3) Pelaksanaan Vaksinasi April 2021-Maret 2022 Tahap 3

Target penerapan vaksinasi pada langkah ini merupakan warga rentan dari pandangan geospasial, sosial dan ekonomi.

a) Kendala Internal

Berdasarkan hasil temuan penelitian, kendala eksternal pada pelaksanaan tahap 3 ditemukan berbagai kendala diantaranya, pada saat masyarakat pendaftaran vaksinasi ada beberapa Nomor Induk Kependudukan masyarakat tidak ditemukan sehingga mereka harus melapor kepada Dukcapil terlebih dahulu. Puskesmas meminta tunggu waktu kurang lebih 2 minggu kepada masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi, karena ketersediaan vaksinasi yang terbatas. Selain itu kapasitas cold chain kurang mencukupi untuk penyimpanan vaksin.

b) Kendala Eksternal

Untuk kendala eksternal pada pelaksanaan tahap 3 ini berasal dari sasarannya yaitu masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat

Lintau Buo akan penerapan vaksinasi Covid-19.

4) Pelaksanaan Vaksinasi April 2021-Maret 2022 Tahap 4

Sasaran pelaksanaan vaksinasi pada langkah ini ialah warga serta pelakon perekonomian dengan pendekatan kluster cocok dengan ketersediaan vaksin.

a) Kendala Internal

Untuk kendala internal dalam pelaksanaan tahap 3 ini tidak begitu ditemukan. Hanya saja sudah kurang tersedianya persediaan merk vaksin yang ada pada tahap sebelumnya. Dan pihak puskesmas juga kesulitan dalam menerima masyarakat yang minta divaksin dengan jumlah satu orang, karen nantinya akan berdampak kepada dosis vaksin.

b) Kendala Eksternal

Berdasarkan hasil penemuan riset, hambatan eksternal yang terjalin pada tahap 4 ini adalah masih berasal dari sasarannya yaitu masyarakat. Banyaknya masyarakat hanya menyelesaikan dosis pertama tanpa menuntaskan dosis kedua dengan alasan sudah mendapatkan sertifikat pertama. Apalagi hingga 2022 ini, minimnya masyarakat yang melanjutkan kepada dosis booster, masyarakat melaksanakan booster hanya sebatas kebutuhan untuk syarat bepergian menggunakan pesawat, bukan karena kewajiban.

PENUTUP

Bersumber pada hasil riset serta ulasan yang sudah dicoba oleh periset, hingga bisa disimpulkan selaku selanjutnya: (1) Berdasarkan pelaksanaan vaksinasi pada tahap keseluruhan kendala internalnya yaitu ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Sumber daya manusia pada agen pelaksana yang belum optimal. Dalam registrasi pelaksanaan vaksinasi, Nomor Induk Kependudukan masyarakat tidak ditemukan sehingga mereka harus melapor kepada Dukcapil terlebih dahulu. Selain itu kapasitas cold chain kurang mencukupi untuk

penyimpanan vaksin; dan (2) Berdasarkan pelaksanaan vaksinasi pada tahap keseluruhan kendala eksternalnya adalah berasal dari sasaran pelaksananya. Minimnya pemahaman warga Lintau Buo hendak penerapan vaksinasi Covid- 19. Banyaknya warga hanya menyelesaikan dosis pertama tanpa menuntaskan dosis kedua dengan alasan sudah mendapatkan sertifikat pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Argista, Z. L. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Bungin, Burhan. 2020. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif- Kualitatif- Mixed Methods; Positivsm-Postpositivism- Phenomenology-Post Modern, Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. Jakarta: Kencana.

Farina Gandrayani, F. H. (Volume 10 Nomor 1, April 2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia : Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 23-41.

Fitriyana, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 Di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. 1-12.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Ditjen P2P Kemenkes RI. (2021). Tentang Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.